

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang terdapat pada alinea ke-4 UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa sangat ditopang dengan sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, agar menjadikan SDM Indonesia berkualitas, diperlukan peningkatan mutu pendidikan (Juanda, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang bisa di raih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 3, sistem pendidikan nasional adalah semua komponen pendidikan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara menyeluruh.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia secara menyeluruh. Mutu pendidikan merupakan salah satu isu sentral pendidikan selain isu-isu pemerataan, relevansi, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dewasa ini banyak upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan oleh berbagai pihak (Widodo, 2017).

Mutu pendidikan harus diupayakan untuk mencapai kemajuan yang dilandasi oleh suatu perubahan terencana. Menurut Syaiful Sagala, peningkatan mutu pendidikan diperoleh melalui dua strategi, yaitu peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi akademis (*high based education*) untuk memberi dasar minimal dalam perjalanan yang harus ditempuh untuk mencapai mutu pendidikan yang dipersyaratkan oleh tuntutan zaman. Selanjutnya, peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada keterampilan hidup (*broad based*

education) yang esensial yang dicakupi oleh pendidikan yang berlandaskan luas, nyata dan bermakna (Widodo, 2017).

Pemerintah selalu merencanakan berbagai upaya untuk mencari solusi masalah pemerataan pendidikan. Salah satu solusi pemerintah untuk pemerataan pendidikan adalah menyediakan skema alokasi anggaran yang dikenal dengan skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Rencana dana BOS merupakan rencana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada lembaga pendidikan sebagai pelaksana rencana wajib belajar (Womsiwor et al., 2020). Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 12 tahun (Nurhaeda, 2017).

Madrasah negeri dan madrasah swasta yang telah mendapatkan izin operasional dapat menerima program bantuan operasional sekolah (BOS), bagi madrasah yang menolak BOS harus diputuskan melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite madrasah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di madrasah tersebut. Semua madrasah negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali siswa, sedangkan untuk madrasah swasta yang mendapatkan bantuan pemerintah maupun pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasional. Untuk penyaluran dana BOS pada madrasah swasta dilakukan setiap triwulan (empat tahap), sesuai pengajuan RKAM dari madrasah swasta. Sedangkan untuk madrasah negeri, pencairan dana BOS dilakukan langsung oleh satker Madrasah ke KPPN, tanpa harus memperhatikan periode triwulanan (Kementerian Agama RI, 2016).

Kementrian Agama Kabupaten Sukabumi senantiasa menyalurkan dana bantuan oprasional sekolah (BOS) pada sekolah-sekolah di bawah naungannya, baik negeri ataupun swasta. Madrasah Ibtidaiya (MI), Madrasah Tsanawiya (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) merupakan sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dalam pengelolaan dana BOS, sekolah berada dibawah kendali berbagai pihak, badan resmi dan pemerintah kota (komite sekolah) (Amborowati & Marco, 2016).

Terdapat empat Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang berada di Kabupaten Sukabumi. Jumlah seluruh tenaga kependidikan sekitar 176 orang. Berdasarkan hasil studi pendahuluan peneliti, diketahui bahwa mutu pendidikan Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Sukabumi sudah cukup baik, dilihat dari banyaknya siswa yang memiliki nilai akademik yang baik. Penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) di lingkungan kantor kementrian agama kabupaten Sukabumi berjalan dengan cukup baik dengan diadakannya pelatihan untuk tenaga kependidikan madrasah yang ada di kabupaten sukabumi dalam pengelolaan dana BOS.

Namun, dalam pelaksanaan penyaluran dana BOS ini terkadang terjadi keterlambatan, hal ini dikarenakan beberapa masalah atau hambatan yang ada. Keterlambatan pencairan dana BOS dan perubahan peraturan terkait juknis pengelolaan dana dari pemerintah membuat operasional sekolah tidak berjalan tepat waktu (Hidayat et al., 2019). Kepala madrasah memiliki peranan untuk mengelola dana tersebut, selaku pemegang jabatan kepala madrasah harus memahami manajemen. Setidaknya aspek yang relevan dapat dikompilasi merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan anggota, mengesahkan dan mengevaluasi berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan (Azhar, 2017).

Seringnya terjadi keterlambatan ini diakibatkan karena sekolah kurang efisien dalam mengelola dana BOS sehingga pencapaian tujuan pengelolaan dana BOS menjadi kurang efektif. Keterlambatan penyaluran dana BOS juga berakibat

pada menurunnya kinerja SDM Madrasah. Semangat mereka dalam mengelola pendidikan akan berkurang ketika kewajiban mereka tetap dilaksanakan sedangkan hak-haknya tidak diperoleh. Lebih luasnya, mutu pendidikan akan semakin menurun akibat kinerja SDM yang kurang baik.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk *studi* lebih dalam mengenai dampak penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) terhadap peningkatan mutu madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Dari empat Madrasah Aliyah Negeri yang ada di Kabupaten Sukabumi peneliti akan melakukan penelitian pada MAN 1 Sukabumi dan MAN 3 Sukabumi, hal ini didasari karena jumlah siswa yang ada di kedua Madrasah Aliyah Negeri ini lebih banyak dari pada yang lainnya, hal tersebut membuat proses manajemen penyuluran dana bantuan operasional sekolah akan berpengaruh karena memiliki jumlah peserta didik yang banyak begitu pula terhadap mutu pendidikan pada madrasah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MAN 1 dan MAN 3 Sukabumi?
2. Bagaimana Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 1 dan MAN 3 Sukabumi?
3. Bagaimana Pengaruh Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 1 dan MAN 3 Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MAN 1 dan MAN 3 Sukabumi

2. Mendeskripsikan Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 1 dan MAN 3 Sukabumi
3. Mendeskripsikan Pengaruh Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 1 dan MAN 3 Sukabumi

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memperkuat teori-teori yang sudah ada sehubungan dengan masalah yang di bahas mengenai manajemen dana bantuan oprasional sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu pendidikan.
2. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi instansi sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta diharapkan mampu menjadi bahan untuk monitoring, evaluasi dan pengawasan manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu pendidikan.

E. Kerangka Pemikiran

Meningkatnya kebutuhan dalam pendidikan, mendorong pemerintah menyalurkan berbagai bantuan demi kelangsungan pendidikan di Indonesia yaitu dana bantuan operasional sekolah (BOS) (Fahmi, 2017). Pemantauan penggunaan anggaran pendidikan merupakan kegiatan untuk melindungi rencana, program, dan keputusan yang diambil dan dilaksanakan di bidang pendidikan. Oleh karena itu, pemantauan penggunaan anggaran pendidikan dapat digambarkan sebagai proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengoreksi pekerjaan yang dilakukan dan diselesaikan dengan maksud agar sesuai dengan rencana awal (Matin, 2014).

Dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2019 dijelaskan secara umum, program BOS dirancang untuk mengurangi beban pembiayaan publik kualitas pendidikan. Pengelolaan dana bantuan operasional madrasah (BOS) sangat bergantung pada kepemimpinan kepala madrasah. Kepala madrasah harus memahami manajemen dalam menjalankan tugasnya. Sekurang-kurangnya sebagai pihak terkait, kepala madrasah dapat merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan, memberdayakan berbagai sumber daya organisasi dan mengevaluasi untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan (Azhar, 2017).

Peran kepala madrasah dalam pebgelolaan dana BOS diharapkan mampu meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Dalam rangka pengelolan dana BOS perlu adanya manajemen yang baik. Menurut Henry Fayol dikutip dari Grebner (2015) proses manajemen terdiri dari *Planning, Organizing, Controlling* dan *Leading*.

Mutu pendidikan menurut Sudarwan Danim (2013) mengacu pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya. Upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan sulit dipisahkan dari manajemen mutu, semua fungsi manajemen diselenggarakan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Namun, tidak semua lembaga pendidikan dan pemangku kepentingan dapat memahami dan berkomitmen terhadap standar nasional pendidikan (Sani et al., 2015).

Pendidikan yang bermutu adalah model pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dan kemampuan. Keunggulan dan kemampuan, idealnya, dihargai publik di ranah akademik, teknikal-vokasional, atau kejuruan (keterampilan), yang dilandasi oleh mutu kompetensi profesional, personal, sosial, kepribadian, moral, serta akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (*life skill*) di ranah moral, etis, dan sosial. Sudradjat lebih lanjut menegaskan bahwa pendidikan bermutu adalah

pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (insan kamil), yaitu manusia dengan kepribadian yang integratif, utuh, yaitu individu yang mampu memadukan unsur iman, ilmu, dan amal; antara ilmu, teknologi dan taqwa untuk standar lulusannya (Sudradjat, 2005).

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, delapan standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh sekolah. Delapan standar pendidikan tersebut meliputi: a) standar isi (pelaksanaan dan pengembangan kurikulum), b) standar proses, c) standar penilaian, d) standar kompetensi lulusan, e) standar pendidik dan tenaga kependidikan, f) standar pengelolaan elemen di institusi pendidikan, g) standar pembiayaan pendidikan, h) standar sarana dan prasarana pendidikan. Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



F. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 1 dan MAN 3 Sukabumi.

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 1 dan MAN 3 Sukabumi.

G. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Aklima pada tahun 2020 dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Bos Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di Min 3 Banda Aceh”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan tujuan program terbagi menjadi tiga tujuan yaitu untuk sekolah, untuk guru dan siswa, dapat dikatakan sangat efektif. Untuk anak-anak dari keluarga miskin, mereka mendapat beasiswa dari anggaran Yayasan BOS, dan setiap siswa juga diberikan buku jilid madrasah. Audit eksternal dilakukan oleh tim audit dari Kementerian Pendidikan Kota (Kemenag) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk mengetahui relevansi program dengan kebutuhan dan sesuai arahan masing-masing. tanggung jawab pelaporan penggunaan dana BOS (Aklima, 2020).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Sandi Setiawan, Ismet Basuki, Erny Roesminingsih pada tahun 2021 dengan judul “Manajemen Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyaluran dana untuk mendukung penyelenggaraan sekolah ke madrasah dilakukan sesuai dengan

petunjuk teknis dan harus melalui tahapan pendistribusian, seperti dua tahap, dengan masing-masing tahap mencapai 50% dari total dana. Peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah terlihat pada fasilitas yang diberikan kepada siswa dan juga pada proses setiap pembelajaran dimana pada fasilitas yang diberikan kepada siswa tercapai hasil atau produk yang diharapkan. Sebagai Madrasah Aliyah Tauhid Surabaya dengan kesempatan belajarnya dapat meningkatkan semangat belajar siswa sehingga mampu mencapai prestasi yang luar biasa (Setiawan et al., 2021).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mazidah pada tahun 2018 dengan judul “Manajemen Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan di Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Malang telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan pembiayaan dana untuk mendukung kegiatan pesantren dalam rangka peningkatan mutu pondok pesantren pada kantor Kementerian Agama Provinsi Malang dilakukan sesuai dengan waktu pencairan atau penyaluran dan pada saat laporan. Makna dana kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan pesantren dengan dana bantuan operasional sekolah dapat meningkatkan prestasi siswa, yang dibuktikan dengan prestasi siswa, dengan meningkatnya biaya guru dari dana bantuan eksekutif sekolah (Mazidah, 2018).
4. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Sekti Nurtyas Gigih Panganti pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gondanglegi Kabupaten Malang”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kepala sekolah dan asisten pengajar mengetahui pengelolaan dana BOS dengan bertindak sebagai pengawas dalam penyusunan dan pengelolaan dana

BOS SMPN 1 Gondanglegi agar sesuai dengan yang diharapkan. Metode alokasi modal BOS biasanya adalah alokasi bertahap tarik uang langsung ke rekening sekolah lebih detail seperti ini dengan memasukkan nomor rekening di dapodik, informasi di dapodik kemudian diverifikasi oleh Kemendikbud dan pihak bank. Jika informasi sudah diinformasikan dengan baik, data ditransmisikan ke General Manager, Bendahara untuk kemudian mencairkan dana yang dicairkan akan menerima surat SP2D untuk kemudian mengirimkan uang tersebut ke sekolah yang bersangkutan (Panganti, 2021).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Syafitri Samosir pada tahun 2022 dengan judul “Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 163088 Tebing Tinggi”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Badan Pengawas dana sekolah berguna untuk peningkatan kualitas penyuluhan dan sarana prasarana. Berdasarkan hasil penelitian, dana BOS di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi telah banyak digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana seperti perpustakaan, termasuk pembelian buku pelajaran bagi siswa dan guru untuk menunjang proses pembelajaran dan menambah jumlah fasilitas komputer di perpustakaan. dan laboratorium serta administrasi sekolah, dengan demikian, jika sekolah memiliki kemampuan keuangan yang baik maka segala fasilitas kegiatan belajar siswa dapat terpenuhi. Semakin lengkap fasilitas belajar maka akan semakin mudah kegiatan belajarnya. Kegiatan pembelajaran yang baik dapat memberikan kesan positif bagi siswa dan kualitas sekolah dapat menjadi lebih maju dan meningkat. Selain itu didukung dengan penggunaan dana BOS Proses yang tepat, tujuan yang tepat dapat meningkatkan kualitas sekolah (Samosir, 2022).
6. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri pada tahun 2014 dengan judul “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS SD di Kecamatan

Mandigin Koto Selayan Kota Bukittinggi dalam hal perencanaan, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS sesuai rencana telah dilaksanakan dengan baik. Selama ini, penggunaan modal Dewan Pengawas berjalan lancar. Dan terakhir, pelaporan dan pertanggungjawaban dana BPK dapat dilakukan dengan cukup baik, secara umum dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BPK SD di Kecamatan Mandiaingin Koto Selayan Kota Bukittinggi dapat dikatakan telah selesai. cukup bagus. Oleh karena itu, diperlukan pengelola untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan dana Dewan Pengawas untuk mencapai hasil yang baik (Fitri, 2014).

7. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Hindahsari pada tahun 2022 dengan judul “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan dalam Penyelenggaraan Pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan kegiatan dana bantuan pendidikan dilakukan dalam 3 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Menurut teori Jones, pengelolaan keuangan dilakukan melalui 3 tahap: perencanaan anggaran, pelaksanaan keuangan dan evaluasi Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa pengelolaan dana BOP di Departemen Agama Kabupaten Mojokerto sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan. bahwa upaya menciptakan layanan penyaluran modal BoP yang berkualitas diawali dengan penganggaran dan waktu pencairan BoP. Upaya kedua adalah memastikan keakuratan pendataan jumlah siswa dan anggaran BOP yang diterima RA. Upaya ketiga adalah melakukan assessment untuk menilai kemampuan penyerapan anggaran dan pelaksanaan alokasi modal dari PB. Pemberian pelayanan dana BOP pada kantor Kementerian Agama Provinsi Mojokerto menganut aspek pelayanan keandalan, jaminan, empati, daya tanggap dan bukti fisik. Penyaluran dana BOP tepat waktu,

cepat, tanggap, ramah, jujur, mengutamakan kepentingan masyarakat serta didukung sarana dan prasarana yang memadai (Hindahsari, 2021).

8. Penelitian yang dilakukan oleh WA Reni pada tahun 2016 dengan judul “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dan Implementasinya Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTS GUPPI Samata”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dana BOS merupakan bantuan yang diberikan sekolah untuk meringankan beban orang tua. Selain itu, juga bertujuan untuk mencerdaskan anak negeri ke arah peningkatan kualitas siswa dan memenuhi kebutuhan sekolah seperti membeli buku, ATK, membayar gaji guru yang layak, memperbaiki handphone, dan yang lainnya. Madrasah juga tidak menggunakan dana BOS secara sembarangan, melainkan atas dasar petunjuk teknis penggunaan dana BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peningkatan mutu pendidikan meliputi input, proses dan hasil pendidikan yang saling mempengaruhi. Melalui input, siswa baru harus diuji untuk melihat seberapa baik siswa baru dapat menyerap pekerjaan guru, kemudian melalui proses yang merupakan faktor pendukung untuk mendapatkan keluaran yang mereka butuhkan. pembelajaran selama 3 tahun, output adalah hasil dari input dan proses, dan output adalah hasil akhir atau faktor penentu input dan proses, jika input dan proses efisien maka output akan menjadi kualitas baik (Reni, 2016).
9. Penelitian yang dilakukan oleh Tia Noza Wella pada tahun 2022 dengan judul “Manajemen Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Swasta Islam Al-Furqon Tulang Bawang Barat”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dana BOS dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen sekolah, khususnya kewenangan sekolah dalam merencanakan, mengelola dan mengawasi program-program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Pengelolaan dana Dewan Pengawas juga memuat peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan Dewan Pengawas. dana, yaitu: Pemerintah daerah mengelola dana tersebut sesuai

dengan peraturan perundang-undangan; Pengelolaan modal di tingkat pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Pengawas di tingkat provinsi dan Badan Pengawas di tingkat kabupaten/kota. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak sesuai dengan juknis dapat dikenakan sanksi hingga penyaluran dana dihentikan (Wella, 2022).

10. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarni pada tahun 2014 dengan judul “Efektivitas Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu di Madrasah”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perkembangan pengelolaan dana VSP sangat positif. Aspek positif dari pengelolaan properti VSP terlihat pada tahap persiapan, proses implementasi dan kegiatan pasca implementasi, efek yang dihasilkan dan penilaian efektivitas tim VSP Madrasah secara keseluruhan. Dana BOS telah memberikan dampak yang sangat positif terhadap peningkatan mutu madrasah, yang diukur dengan indikator yang menunjukkan peningkatan status akreditasi madrasah, peningkatan jumlah siswa, dan angka retensi dan putus sekolah. Dampak positif dari VSP juga tercermin dari prestasi para siswa madrasah yang tercatat dalam berbagai kompetisi. Selain itu, dana VSP mampu meningkatkan suasana sekolah dan semangat siswa (Sumarni, 2014).

Persamaannya dengan penelitian ini ada pada variabel X yaitu manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu berada pada variabel Y. Pada penelitian sebelumnya lebih fokus pada guru sebagai penerima dana BOS sedangkan pada penelitian ini tidak hanya pada guru tapi juga pada tenaga kependidikan sebagai pengelola dana BOS. Selain itu, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bisa memberikan hasil yang lebih akurat.